



LAPORAN

*PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TAHUN 2024*

PENGADILAN NEGERI
/ HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS IA

MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
dan
WILAYAH BEBAS BERSIH MELAYANI (WBBM)

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



www.pn-gresik.go.id



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK**

Jalan Raya Permata Selatan Nomor 6, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur 61121. www.pn-gresik.go.id, gresik.pn@gmail.com

**LAPORAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2024**

A. Pendahuluan

1. Umum

Perjalanan untuk mencapai Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan badan peradilan yang agung membutuhkan integritas, kerja keras, komitmen, keyakinan dan kerja sama dari semua komponen Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Salah satu langkah untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan Pembangunan Zona Integritas dimana yang dimaksud dengan Zona Integritas (untuk selanjutnya disebut ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (untuk selanjutnya disebut WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sejak Tahun 2020 Pengadilan Negeri Gresik telah mencanangkan dan membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Gresik melanjutkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pengadilan Negeri Gresik telah memiliki rencana kerja dalam melaksanakan pembangunan ZI menuju WBBM sebagai pedoman pelaksanaan bagi seluruh jajaran mulai dari pejabat dan pegawai dimana atas pelaksanaan tersebut juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya. Demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat maka Pengadilan Negeri Gresik terus

berbenah dan berupayan melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagipara pencari keadilan.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan Pembangunan ZI Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ini disusun dengan maksud dan tujuan :

- a. Mengetahui perkembangan/kemajuan pelaksanaan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Gresik;
- b. Mengetahui apakah rencana aksi pelaksanaan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Gresik berjalan dengan targer yang telah ditetapkan;
- c. Memberikan masukan kepada pimpinan untuk dipertimbangkan menjadi kandidat satker dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani meliputi pemantauan 6 (enam) area perubahan.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

B. Materi Laporan

1. Kegiatan yang Dilaksanakan / Kejadian Tertentu

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembangunan ZI menuju wilayah bebas dari korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Menuju wilayah bebas dari korupsi;
- b. Pengoptimalan pemanfaatan Inovasi – Inovasi Unggulan pada Pengadilan Negeri Gresik.

2. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Proses pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada Pengadilan Negeri Gresik pada umumnya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.

C. Hasil yang Dicapai

1. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Dalam melaksanakan penilaian mandiri, Pengadilan Negeri Gresik membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 30/KPN.W14-U31/OT.00/II/2024 tanggal 29 Januari 2024, dan telah melaksanakan Penilaian Mandiri pada awal tahun 2024. Adapun penilaian mandiri dilaksanakan terhadap 2 (dua) komponen, yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil yang mana hasilnya adalah sebagai berikut.

| No | Penilaian | Nilai |
|---|---|---------------|
| I | Pengungkit (Pemenuhan + Reform) | 91,93% |
| | a. Manajemen Perubahan | 100,00% |
| | b. Penataan Tata Laksana | 100,00% |
| | c. Penguatan Manajemen SDM | 100,00% |
| | d. Peningkatan Akuntabilitas | 88,60% |
| | e. Penguatan Pengawasan | 75,34% |
| | f. Peningkatan Pelayanan Publik | 100,00% |
| II | Hasil | 91,78% |
| | a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | 86,36% |
| | 1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) | 96,75% |
| | 2. Capaian Kinerja lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya | 50,00% |
| | b. Pelayanan Publik yang Prima | 98,75% |
| | 1. Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP) | 98,75% |
| Nilai Pembangunan ZI pada Pengadilan Negeri Gresik | | 91,87% |

2. Hasil Pembangunan ZI Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

a. Hasil Konkrit dari Pembangunan ZI Setelah Mendapatkan WBK

- Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Pengadilan Negeri Gresik berusaha untuk menjaga integritas pelayanan terhadap masyarakat senantiasa bersih, akuntabel, dan transparan. Hasil konkrit dari pelaksanaan ini dapat dilihat dari :

1) Indeks persepsi anti korupsi (IPAK) sebagai berikut :

| Periode | Jumlah responden | Nilai Indeks | Kategori |
|-------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Triwulan I Tahun 2023 | 153 orang | 3,98% | Bersih dari Korupsi |
| Triwulan II Tahun 2023 | 151 orang | 3,97% | Bersih dari Korupsi |
| Triwulan III Tahun 2023 | 151 orang | 3,98% | Bersih dari Korupsi |
| Triwulan IV Tahun 2023 | 149 orang | 3,87% | Bersih dari Korupsi |

2) Capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Gresik menjadi lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya yaitu terbukti sebagai berikut :

- i. Mendapatkan Penghargaan Peringkat 2 Kategori Pengadilan Negeri Kelas IA dengan jumlah perkara 1001 s.d 2000 periode Januari – Oktober 2023 pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.
- ii. Mendapatkan Penghargaan Pencapaian Terbaik (99,4%) Kategori Jumlah Perkara > 2000 dalam Pelaksanaan Pelimpahan Berkas Perkara Melalui E-Berpadu pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya.
- iii. Mendapatkan Penghargaan Peringkat 3 Lomba Layanan Hukum Tahun 2023 Kategori Pos Bantuan Hukum dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

- Pelayanan Publik yang Prima

Dalam mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Gresik berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara transparan dengan memaksimalkan teknologi informasi dan senantiasa mengembangkan pelayanan melalui inovasi-inovasi yang dapat dengan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Hasil konkrit dari pelaksanaan ini dapat dilihat dari :

1) Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP) sebagai berikut :

| Periode | Jumlah responden | Nilai Indeks | Kategori |
|-------------------------|------------------|--------------|-------------|
| Triwulan I Tahun 2023 | 150 orang | 3,86% | Sangat Baik |
| Triwulan II Tahun 2023 | 157 orang | 3,97% | Sangat Baik |
| Triwulan III Tahun 2023 | 152 orang | 3,99% | Sangat Baik |

| | | | |
|------------------------|-----------|-------|-------------|
| Triwulan IV Tahun 2023 | 153 orang | 3,95% | Sangat Baik |
|------------------------|-----------|-------|-------------|

- Hasil konrit terkait peran Agen Perubahan

Peran Tim Agen Perubahan yaitu menyusun rencana tindak secara konkret yang memuat kriteria program perubahan, yaitu:

- Mendorong pencapaian kinerja utama;
- Mendorong penguatan integritas serta mengatasi isu strategis;
- Mendorong peningkatan kualitas layanan bagi pengguna layanan.

Agen Perubahan dituntut untuk inovatif dalam melayani dan menjaga hubungan baik antar para hakim maupun pegawai sehingga dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat dengan lebih baik.

Adapun Inovasi yang menjadi program kerja Agen Perubahan adalah inovasi yang mendorong pencapaian kinerja yaitu pembuatan aplikasi Ijin Online (IJOL) dan Permohonan Mandiri (PERMADI).

Inovasi Ijol ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan Pegawai dalam hal pembuatan surat izin;
2. Mengontrol Kedisiplinan Pegawai dengan lebih efektif dan efisien.

Hasil peran tim agen perubahan setelah melakukan rencana aksi, adalah sebagai berikut.

| NO. | PERAN TIM AGEN PERUBAHAN | KONDISI | |
|-----|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH ADANYA PERAN TIM AGEN PERUBAHAN |
| 1. | Pembuatan Aplikasi IJOL (Ijin Online) | Sebelumnya hanya disediakan form permohonan ijin. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memudahkan Pegawai dalam hal pembuatan surat izin; 2. Mengontrol Kedisiplinan Pegawai dengan lebih efektif dan efisien. |
| 2. | Pembuatan Aplikasi PERMADI (Permohonan Mandiri) | Sebelumnya hanya disediakan form permohonan manual. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memudahkan Pegawai dalam hal pembuatan surat izin; 2. Mengontrol Kedisiplinan Pegawai dengan lebih efektif dan efisien. |

b. Keterkaitan Pembangunan ZI dengan Isu Strategis Unit/Satuan Kerja

Isu-isu strategis pada Pengadilan Negeri Gresik yaitu sebagai berikut:

- 1) Beberapa Wilayah Gresik yang secara topografi merupakan kepulauan maka jangkauan akses masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Gresik terbilang jauh dan sulit terutama bagi kaum penyandang disabilitas.
- 2) Lonjakan yang tinggi dari masyarakat pencari surat keterangan tidak di pidana dan tidak dicabut hak pilihnya saat musim Pilkada, Pemilu, dan Pemilihan Perangkat Desa serta Lonjakan yang tinggi dari masyarakat pencari penetapan akta kematian utamanya masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol yang sudah meninggal dunia cukup lama dan data kependudukannya sudah terhapus namun belum memiliki akta kematian membuat ketersediaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Gresik menjadi *over capacity* (melebihi kapasitas).
- 3) Pelaksanaan tata kelola pelayanan instansi pemerintah yang satu dengan instansi pemerintah yang lainnya secara terpisah-pisah membuat pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan dari 2 (dua) atau lebih instansi pemerintah menjadi lama.

Dengan adanya isu – isu strategis diatas, untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat maka Pengadilan Negeri Gresik membuat inovasi dalam hal pelayanan yaitu berupa pemanfaatan teknologi informasi serta pelayanan langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan Pengadilan.

c. Inovasi Unggulan Dalam Penguatan Integritas, Kinerja, dan Layanan

Inovasi unggulan dalam penguatan integritas, kinerja, dan layanan antara lain :

1) Anjungan Pelayanan Mandiri PTSP

Dalam rangka pencegahan Covid-19 di lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri Gresik berinovasi dengan membangun Anjungan Pelayanan Mandiri PTSP.



Inovasi ini mengadopsi inovasi yang telah dibangun sebelumnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu Anjungan Pelayanan Mandiri PTSP Pengadilan Tinggi Surabaya dimana inovasi ini memanfaatkan teknologi teleconference untuk mempertemukan pengguna layanan pengadilan dengan petugas PTSP. Dengan meminimalisir kontak secara langsung, inovasi ini diharapkan dapat menekan angka penularan Covid-19 di lingkungan Pengadilan Negeri Gresik.

Anjungan Pelayanan Mandiri PTSP ini mempunyai sarana penunjang sebagai berikut:

1. PC sebanyak 6 unit, masing-masing untuk layanan Umum, Perdata, Pidana, Hukum, PHI, e-Court, dan SIWAS;
2. Printer sebanyak 1 unit;
3. Rak dokumen sebanyak 1 unit;
4. Sarana pendukung lainnya seperti kursi, AC, dan jaringan internet.

2) Gus Prima

Gus Prima merupakan aplikasi asisten virtual milik Pengadilan Negeri Gresik yang dapat digunakan baik oleh pihak eksternal (pengguna layanan pengadilan) maupun pihak internal Pengadilan Negeri Gresik. Bagi pihak eksternal, Gus Prima dapat digunakan untuk mencari informasi mengenai status perkara, jadwal sidang, persyaratan layanan, dll. Bagi pihak internal, Gus Prima berfungsi sebagai reminder (pengingat) jadwal sidang, notifikasi MIS, notifikasi surat masuk, dll. Gus Prima dapat digunakan dengan menghubungi nomor **081131134545**.

3) Barcode Persyaratan Layanan Pengadilan

Barcode persyaratan layanan pengadilan merupakan upaya Pengadilan Negeri Gresik untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi pengguna layanan pengadilan untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan layanan pengadilan. Barcode pelayanan ini tersedia di Lobi Utama maupun Anjungan Mandiri PTSP Pengadilan Negeri Gresik serta pada website Pengadilan Negeri Gresik. Kini pengguna layanan pengadilan dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai persyaratan layanan pengadilan cukup dengan men-scan barcode tersebut. Barcode persyaratan layanan pengadilan dapat yang terdapat pada website Pengadilan Negeri Gresik dapat

diakses melalui tautan <https://pn-gresik.go.id/detail-pengumuman-92-barcode-persyaratan-layanan-pengadilan>.

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur pada Pengadilan Negeri Gresik diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas melalui Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI maupun Lembaga Lainnya, diantaranya :

| No | NAMA | JABATAN | NAMA DIKLAT | | TANGGAL DIKLAT |
|----|-----------------------------------|---------|---|------------|--------------------------------|
| | | | TEKNIS | NON TEKNIS | |
| 1 | Etri widayati, S.H., M.H. | Hakim | Peningkatan kompetensi Aparat Penegak hukum dalam penanganan tindak pidana dibanding perpajakan gelombang I bagi hakim tingkat banding, Hakim tingkat pertama dan Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti Peradilan Umum wilayah Pulau Jawa oleh badan Litbang Diklat Hukum dan peradilan mahkamah agung RI bekerjasama dengan direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI | | 06 Maret s.d. 17 Maret 2023 |
| 2 | ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H | Hakim | Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Angkatan XIX bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan | | 12 Oktober s.d 8 November 2023 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|------------|---|--|-------------------------------|
| | | | Peradilan Mahkamah Agung RI | | |
| 3 | SRI SULASTUTI, S.H. | Hakim | TEKNIS YUDISIAL Penistaan Agama bagi hakim peradilan umum dan peradilan militer seluruh Indonesia oleh badan Litbang Diklat Hukum dan peradilan mahkamah agung RI | | 27 februari s.d 11 Maret 2023 |
| | | | Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Berdimensi KEPPH Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia | | 11 Juli s.d. 5 Agustus 2023 |
| 4 | M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H. | Hakim | Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Berdimensi KEPPH Kerjasama Pusdiklat Teknis Peradilan dengan Komisi Yudisial RI | | 11 Juli s.d. 5 Agustus 2023 |
| 5 | IBNU SOLA,SH.,MH. | Sekretaris | | Evaluasi Terkait Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Wilayah Hukum Jawa Timur oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI | 28 Maret 2023 |
| | | | | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Anggaran Tahun 2023 pada wilayah Jawa Timur | 19 - 21 Desember 2023 |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|---------------------------------|
| 6 | Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H | Kasub Bag Umum dan Keuangan | | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Anggaran Tahun 2023 pada wilayah Jawa Timur | 19 - 21 Desember 2023 |
| 7 | Adelia Febrianti, S.Sos | Kasub Bag PTIP | | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Anggaran Tahun 2023 pada wilayah Jawa Timur | 19 - 21 Desember 2023 |
| 8 | Satryo Wicaksono, S.T | Pranata Komputer Ahli Pertama | | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Anggaran Tahun 2023 pada wilayah Jawa Timur | 19 - 21 Desember 2023 |
| 9 | MEIRISA YUNITA, S.H. | Analisis Perkara Peradilan | Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan secara Blended Learning Gelombang 3 angkatan VII dan X Tahun 2023 Oleh Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI | | 28 Juni s.d. 14 Juli 2023 |
| 10 | ERINA RATNA BIDARI, S.H. | Analisis Perkara Peradilan | Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan secara Blended Learning Gelombang 3 angkatan VII dan X Tahun 2023 Oleh Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI | | 28 Juni s.d. 14 Juli 2023 |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------------------------|
| 11 | M.RISYAH FARRAS DEKA MAGHFIRA ,S.H. | Analisis Perkara Peradilan | Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan secara Blended Learning Gelombang 3 angkatan VII dan X Tahun 2023 Oleh Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI | | 28 Juni s.d. 14 Juli 2023 |
| 12 | Friska Rosalina, A.Md | Pengelola Barang Milik Negara | | Evaluasi Terkait Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Wilayah Hukum Jawa Timur oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI | 28 Maret 2023 |
| 13 | Meyti Agnesta Sembiring, A.Md | Pengelola Perkara | | Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Level – 1 Wilayah Jawa Timur Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI dengan BPSDM Kementerian PUPR RI Tahun 2023 | 29 Mei s.d. 17 Juni 2023 |

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju wilayah bebas dari korupsi pada Pengadilan negeri Gresik periode Tahun 2024 berjalan dengan lancar. Pengadilan negeri Gresik senantiasa selalu membuat inovasi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan terjangkau.

2. Saran

Untuk mengoptimalkan terlaksananya Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Gresik diperlukan peningkatan kualitas SDM dengan pemberian diklat terpadu. Selain itu Pengadilan Negeri Gresik juga harus senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas agar capaian pembangunan zona integritas dapat dipantau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. Penutup

Demikian Laporan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2023/24 Semoga Pengadilan Negeri Gresik dapat mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).



**Ketua Tim Pembangunan
Zona Integritas**

**SARUDI, S.H.
NIP. 196705091996031004**